



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 08 Mei 2021

Halaman: 1

Pemkot Enggan Gegabah

PEMKOT Yogyakarta menganggap larangan mudik di wilayah aglomerasi sangat mendadak. Eksekutif pun tidak mau gegabah mengambil kebijakan dan memilih untuk menunggu kejelasan.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya be-

lum memahami, bagaimana teknis pelarangan mudik lokal di kawasan Yogyakarta Raya itu. Sebab, tentu penerapannya tak semudah membalik telapak tangan.

"Kalau kemarin kan boleh. Maka-

● ke halaman 7

Pemkot Enggan

● Sambungan Hal 1

nya, kebijakan ini sangat teknis dan sangat mendadak. Kita belum tahu bagaimana penapannya (melarang mudik) di wilayah aglomerasi. Kalau yang tertulis kemarin kan boleh, ya," ucap Heroe, Jumat (7/6/21).

Terlebih, dengan status sebagai ibukota provinsi, setiap harinya masyarakat dari kabupaten di sekitar Kota Yogyakarta senantiasa berbondong-bondong masuk, untuk menjalani aktivitas perekonomian masing-masing.

"Kota kan jadi pusat aktivitas ekonomi yang pekerjaannya banyak berasal dari kabupaten di sekitarnya. Bagaimana penerapannya nanti, apakah langsung diliburkan atau bagaimana, saya belum mengerti itu," ungkapnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta itu pun mempertanyakan, jika yang dilarang hanya aktivitas mudik saja, sementara kegiatan perekonomian tetap diperbolehkan, penye-

katannya tentu sangat sulit. "Aplikasinya apa pekerjaan dari luar kota tidak boleh masuk? Bisa jadi problem itu, ya, karena banyak pekerjaan dari luar (kota). Kalau terkait pekerjaan, kemudian

logistik bisa jalan, membedakannya nanti bagaimana," terang Heroe.

"Intinya, sebagai upaya meminimalisir silaturahmi. Tapi, penyelesaiannya seperti apa? Wong nanti selama 6-17 Mei sebagian besar pekerjaan tidak libur," tambahnya.

Oleh sebab itu, orang nomor dua di kota pelajar tersebut memilih menantikan instruksi berikutnya dari pemerintah pusat. Terutama, mengenai pelaksanaan teknisnya. "Makanya, saya masih menelusuri, apakah kebijakan ini bentuknya sudah tertulis atau belum. Kita tunggu saja, ya, aturan teknisnya seperti apa," pungkasnya.

Tindak lanjut

Terpisah, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono, mengakui sudah mengetahui informasi tersebut dari Satgas Penanganan Covid-19. "Kalau dari pernyataan Pak Doni Monardo (Ketua Satgas Penanganan Covid-19) beliau memang mengharuskan mudik lokal ikut dilarang," jelasnya, Jumat (7/5).

Darjad menyatakan, Pemkab Gunungkidul memahami dengan adanya perubahan peraturan yang terkesan mendadak tersebut. Pihaknya pun akan menindaklanjuti kebijakan yang ada. Drajad menilai mudik lokal

seharusnya ikut dibatasi. Sebab potensi penyebaran Covid-19 tetap bisa terjadi meski dalam satu wilayah provinsi yang sama.

Dia mengkhawatirkan dampak dibolehkannya mudik lokal pada wisata di Gunungkidul. Warga dari Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, hingga Kulon Progo berpotensi membanjiri destinasi wisata di Bumi Pandananti saat libur Lebaran nanti.

Itu sebabnya, pembatasan tetap perlu diberlakukan bagi warga dari wilayah tetangga. Pihaknya pun akan mengimplementasikan kebijakan baru tersebut ke masyarakat. "Termasuk kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka Idulfitri nanti," ucapnya.

Berkaitan dengan aktivitas pariwisata selama libur Lebaran, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menyatakan operasional akan mengikuti instruksi pemerintah. Antara lain dalam hal zona kerawannya. Menurutnya, jika destinasi wisata dalam zona merah dan oranye, maka perlu ditutup. Aktivitas wisata aman untuk dibuka jika berada di zona hijau. "Tentu protokol kesehatannya wajib dijalankan dan diingatkan secara ketat," kata Sunaryanta, belum lama ini. (aka/als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005